



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN KAJIAN INOVASI TEKNOLOGI - DENGAN LELANG
2024

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Jl. Kapten Muslihat No. 21, RT. 001/RW. 001, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor 16122
Tlp. (0251) 8338052, website:www.bappeda.kotabogor.go.id



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Nomor SOP	: SOP/LITBANG.2/004
Lintas Fungsi Peta Proses Bisnis	: Melaksanakan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Aktifitas Lintas Fungsi	: Melaksanakan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Tgl. Pembuatan	: 03 Januari 2024
Tgl. Revisi	:
Tgl. Efektif	: 03 Januari 2024
Disahkan oleh	: <div style="text-align: right;"> Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kota Bogor  M. Mashudi, S.T., M.P. NIP. 197707062006041018 </div>
Judul SOP	: PENYUSUNAN KAJIAN INOVASI TEKNOLOGI - DENGAN LELANG










DASAR HUKUM












1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturann Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019 tentang satu data 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
7. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 - 2024
8. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Pendidikan minimal lulusan S1
2. Memahami Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
3. Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor
4. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kelitbangan
5. Memahami Implementasi data dan informasi secara elektronik
6. Penguasaan pemahaman tentang statistik, jurnalistik, iptek, keuangan, infrastruktur, tata kelola pemerintah, ketenagakerjaan, pasar, pendidikan, kesehatan, kelembagaan

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
11. Permendagri no 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor 14. Perwali Kota Bogor 147 tahun 2019 tentang Satu Data Kota Bogor 15. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi	
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2. SOP Surat Keluar 3. SOP Pengendalian Arsip	1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Internet 4. ATK 5. Ruang Rapat dan Kelengkapannya
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat tidak terselenggaranya Kajian Inovasi Teknologi secara optimal sehingga organisasi tidak mendapatkan peluang inovasi yang tepat guna	1. KAK Kajian Inovasi Teknologi 2. RKA/ DPA Kajian Inovasi Teknologi 3. SK Tim Kajian Inovasi Teknologi 4. Laporan Pendahuluan PBJ Kajian Inovasi Teknologi 5. Laporan Antara PBJ Kajian Inovasi Teknologi 6. Laporan Akhir PBJ Kajian Inovasi Teknologi

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Analisis Litbang	Analisis Kebijakan	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Tim Panitia	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
Perencanaan Kajian Inovasi Teknologi dengan Lelang										
1	Mengidentifikasi permasalahan sebagai masukan penyusunan Kajian Inovasi Teknologi						Masukan, saran, laporan tahunan, FGD	1500 menit	Masukan Kajian Inovasi Teknologi	
2	Merumuskan alternatif kebijakan Kajian Inovasi Teknologi						Masukan Kajian Inovasi Teknologi	300 menit	Kebijakan Kajian Inovasi Teknologi	
3	Menyusun draft KAK Kajian Inovasi Teknologi						Kebijakan Kajian Inovasi Teknologi	300 menit	Draft KAK Kajian Inovasi Teknologi	
4	Memeriksa draft KAK Kajian Inovasi Teknologi						Draft KAK Kajian Inovasi Teknologi	30 menit	Draft KAK Kajian Inovasi Teknologi	
5	Menyusun draft RKA/ DPA Kajian Inovasi Teknologi						KAK Kajian Inovasi Teknologi	300 menit	Draft RKA/ DPA Kajian Inovasi Teknologi	
6	Memeriksa draft RKA/ DPA Kajian Inovasi Teknologi dan menyetujui draft RKA/ DPA Kajian Inovasi Teknologi untuk diteruskan ke Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan						Draft RKA/ DPA Kajian Inovasi Teknologi	30 menit	Draft RKA/ DPA Kajian Inovasi Teknologi	SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Pelaksanaan Kajian Inovasi Teknologi										
7	Membuat konsep usulan pembentukan tim dalam rangka Kajian Inovasi Teknologi	 					RKA/ DPA Kajian Inovasi Teknologi	30 menit	SK Tim Kajian Inovasi Teknologi	

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Analisis Litbang	Analisis Kebijakan	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Tim Panitia	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Memeriksa dan paraf konsep usulan pembentukan tim dalam rangka Kajian Inovasi Teknologi dan meneruskan ke Sekretaris						SK tim Kajian Inovasi Teknologi	15 menit	PBJ Kajian Inovasi Teknologi	
9	Memeriksa usulan pembentukan tim dalam rangka Kajian Inovasi Teknologi						PBJ Kajian Inovasi Teknologi	15 menit	Daftar hadir, laporan pendahuluan	
10	Meyetujui usulan pembentukan tim dalam rangka Kajian Inovasi Teknologi						PBJ Kajian Inovasi Teknologi	15 menit	Daftar hadir, laporan Antara	
11	Melaksanakan proses pengadaan PBJ untuk mendukung Kajian Inovasi Teknologi dengan cara lelang						SK tim Kajian Inovasi Teknologi	Tentative	PBJ Kajian Inovasi Teknologi	
12	Melaksanakan rapat laporan pendahuluan dan Focus Group Discussion (FGD)						PBJ Kajian Inovasi Teknologi	300 menit	Daftar hadir, laporan pendahuluan	
13	Melaksanakan rapat laporan antara PBJ Kajian Inovasi Teknologi						PBJ Kajian Inovasi Teknologi	300 menit	Daftar hadir, laporan Antara	
14	Melaksanakan rapat laporan akhir dan Focus Group Discussion (FGD) PBJ Kajian Inovasi Teknologi						PBJ Kajian Inovasi Teknologi	300 menit	Daftar hadir, laporan akhir	
Sosialisasi dan Publikasi										
15	Mensosialisasikan dan mempublikasikan hasil Kajian Inovasi Teknologi						Laporan akhir Kajian Inovasi Teknologi	300 menit	Sosialisasi dan publikasi	SOP surat keluar
16	Menyimpan dan mendokumentasikan kegiatan Kajian Inovasi Teknologi						Rekaman Kajian Inovasi Teknologi	30 menit	Arsip dan dokumentasi	SOP pengendalian arsip